

SEBARAN BASIS HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

Suhartono*

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry
Jl. Ciamis-Banjar Km. 4 Pamalayan Cijeungjing Ciamis
*Email: har436@gmail.com

Artikel diterima : Maret 2020, Revisi diterima : Maret 2020

ABSTRAK

Sektor Kehutanan Kabupaten Pangandaran memiliki potensi menjadi penggerak dalam perkembangan ekonomi daerah. Akan tetapi pengembangan sektor kehutanan terutama hutan rakyat belum fokus pada wilayah yang menjadi basis hutan rakyat sehingga pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia belum optimal dan masih diperlukan strategi yang tepat untuk pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran basis hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran yang berpotensi menjadi skala prioritas pengembangan untuk mendukung perekonomian daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *desk study* yang memanfaatkan data skunder luas hutan rakyat dan luas wilayah di Kabupaten Pangandaran yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Data di analisis secara deskriptif dengan pendekatan metode *Location Quotient* untuk menentukan wilayah yang menjadi basis atau non basis hutan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran termasuk dalam kategori basis hutan rakyat dan dapat dipertimbangkan menjadi skala prioritas pengembangan antara lain Kecamatan Cigugur, Parigi, Sidamulih dan Pangandaran dengan masing-masing nilai LQ 3,21; 1,78; 1,08 dan 1,03.

Kata kunci: Hutan rakyat, Location quotient, Pangandaran

ABSTRACT

The Pangandaran Regency's forestry sector has the potential to be a driving force in regional economic development. However, the development of the forestry sector, especially private forest, has not yet focused on locations of private forest bases so the utilization of available resource potentials has not been optimal so that an appropriate strategy is needed for its development. This study aims to determine the base of private forest in the Pangandaran Regency that potential to support regional economic development. The method used in this study is a desk study by utilizing secondary data on private forest area and area size in the Pangandaran Regency, which is published by the Central Statistics Agency. Data analysis was performed descriptively using the Location Quotient method approach to determine the areas that were the basis or non-basis of private forest. The results showed that 4 of 10 subdistricts in the Pangandaran Regency were included in the category of private forest base and could be a priority scale in development including Cigugur Subdistrict, Parigi Subdistrict, Sidamulih Subdistrict and Pangandaran Subdistrict with LQ value of 3.21; 1.78; 1.08 and 1.03.

Keywords: Location quotient, Pangandaran, private forest

PENDAHULUAN

Peranan potensi sumberdaya alam cukup penting dalam pembangunan sektoral di suatu daerah (Rahmat, 2011). Begitu pula sumberdaya hutan rakyat yang menjadi sumber penyediaan barang dan jasa seperti hasil hutan kayu dan non kayu serta jasa lingkungan bagi kebutuhan manusia. Sektor hutan rakyat memiliki potensi dan peluang untuk menjadi penggerak perekonomian di suatu daerah. Namun demikian, pada kenyataannya di beberapa daerah potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga kinerja ekonomi dari sektor kehutanan dirasa masih rendah. Hal ini karena keunggulan sektor hutan rakyat belum terpetakan sehingga

pengembangan hutan rakyat menurut skala prioritas belum terlaksana.

Sebagai kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Selain terkenal dengan wisata pantainya, Kabupaten Pangandaran memiliki banyak potensi pada sektor lain seperti pertanian dan perikanan. Namun pada beberapa tahun terakhir sebagian wilayah di Pangandaran telah dilanda bencana banjir akibat luapan sungai. Salah satu penyebabnya diduga adanya masalah alih fungsi lahan pada daerah resapan air di wilayah daerah

aliran sungai bagian hulu. Untuk itu upaya-upaya penanaman kembali pada lahan-lahan kritis di daerah aliran sungai bagian hulu harus diprioritaskan. Dengan demikian, pembangunan bidang pertanian khususnya sektor kehutanan dirasa penting karena selain menjadi sarana mitigasi bencana, juga dapat menghasilkan komoditas unggulan daerah.

Pembangunan sektor kehutanan memiliki peran penting dalam meningkatkan produksi hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun jasa lingkungan. Pada konteks tujuan yang lebih luas, pengembangan hutan khususnya pada areal kawasan milik selain untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto dari sektor kehutanan juga menyediakan jasa lingkungan termasuk pencegahan bencana banjir dan longsor. Agar pembangunan khususnya kehutanan terlaksana dengan baik harus berlandaskan prioritas yang jelas dan terencana. Menurut Rustandi (2016), potensi sumberdaya yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda sehingga dalam membuat program

pengembangan suatu wilayah diperlukan studi pendahuluan untuk menggali potensi sumberdaya unggulan yang dimiliki.

Metode *Location Quotient* (LQ) sudah umum digunakan untuk menganalisis sektor unggulan yang berpotensi dikembangkan berdasarkan perbandingan kontribusi suatu sektor pada wilayah yang lebih kecil terhadap sektor yang bersangkutan dalam cakupan wilayah yang lebih luas (Syamsiyah dkk, 2017). Metode ini sudah banyak digunakan dalam menganalisis berbagai komoditas atau sektor unggulan daerah untuk kepentingan pengembangan ekonomi seperti yang telah dipublikasikan dari beberapa hasil penelitian (Suhartono, 2019; Hamdani, 2016; Hasanah, 2016; Nowar, dkk., 2015; Oksatriandhi dan Santoso, 2014; Iyan, 2014; Hidayat, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran basis hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran yang berpotensi menjadi skala prioritas pengembangan untuk mendukung perekonomian daerah

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder luasan hutan rakyat dari laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019. Untuk menentukan wilayah yang menjadi daerah basis hutan rakyat dilakukan analisis LQ. Menurut Hendayana (2003), selain untuk mengidentifikasi sebaran komoditas, metode LQ juga dapat diimplementasikan dalam kajian dan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya. Metode tersebut sudah umum digunakan oleh banyak peneliti dalam bidang pertanian (Rizani, 2017; Iyan, 2014; dan Yulianto & Santoso, 2013), bidang perkebunan (Nugroho dkk., 2018; Jawang, 2018 dan Bangun, 2017) serta bidang kehutanan (Rahmat, 2011).

Untuk mengetahui potensi hutan rakyat yang menjadi basis di Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis dengan menggunakan metode LQ melalui pendekatan komparasi luasan hutan rakyat yang berada di wilayah kecamatan dengan

luas wilayah administratifnya. Pendekatan LQ secara matematis dirumuskan sebagai berikut.

$$LQ_i = \frac{k_i - k_t}{K_i - K_t}$$

k_i = Luas hutan rakyat kecamatan i

k_t = Luas wilayah kecamatan i

K_i = Luas hutan rakyat Kabupaten Pangandaran

K_t = Luas wilayah Kabupaten Pangandaran

Hutan rakyat menjadi sektor basis apabila memiliki nilai $LQ \geq 1$, dan sebaliknya $LQ < 1$ termasuk dalam kriteria bukan basis. Pada kategori basis, sektor hutan rakyat di suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dibanding dengan wilayah lainnya sehingga daerah tersebut memiliki peluang selain memenuhi kebutuhan wilayah sendiri juga berpotensi dapat mengeksport produksinya ke daerah lain. Sementara daerah non basis menunjukkan bahwa produksi hutan rakyat pada wilayah belum sampai pada surplus produksi dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum dan Potensi Sektor Kehutanan di Pangandaran

Pangandaran merupakan kabupaten termuda di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian tenggara, secara geografis berada pada $108^{\circ}30'$ - $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ - $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Wilayah bagian utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan

Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha yang terbagi dalam sepuluh kecamatan. Wilayah bagian selatan berbatasan

langsung dengan garis pantai Samudera Indonesia yang membentang di 6 kecamatan dengan garis pantai mencapai 91 Km (BPS Kabupaten Pangandaran, 2019).

Sektor Kehutanan di Kabupaten Pangandaran yang merupakan bagian dari pertanian memiliki kontribusi penting dalam perekonomian daerah.

Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran tahun 2016 atas dasar harga konstan dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran (BPS Kabupaten Pangandaran, 2019).

Tabel 1. PDRB Kabupaten Pangandaran tahun 2018 atas dasar harga konstan menurut jenis lapangan usaha

No.	Jenis lapangan usaha	PDRB atas dasar harga konstan 2010 (jutaan rupiah)	Persentase (%)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan		24,00
2	Pertambangan dan penggalian	49.262,60	0,67
3	Industri pengolahan	359.440,30	4,91
4	Pengadaan listrik dan gas	5.281,00	0,07
5	pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	890,40	0,01
6	Konstruksi	686.539,60	9,38
7	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor	1.659.882,40	22,69
8	Transportasi dan pergudangan	792.580,72	10,83
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	646.846,00	8,84
10	Informasi dan komunikasi	152.124,70	2,07
11	Jasa keuangan dan asuransi	146.516,80	2,00
12	Real estat	217.208,60	2,96
13	Jasa perusahaan	74.774,70	1,02
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	231.860,90	3,16
15	Jasa pendidikan	385.327,60	5,26
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	17.922,30	0,24
17	Jasa lainnya	132.737,90	1,81

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran (2019)

Walaupun kontribusi ekonomi sektor kehutanan tidak sebesar sektor lain, akan tetapi keberadaan hutan atau ruang terbuka hijau sangat berarti untuk fungsi lingkungan seperti ketersediaan oksigen, membantu menyerap karbon dan fungsi mitigasi bencana. Berdasarkan data statistik wilayah kabupaten Pangandaran memiliki

Sebaran Basis Hutan Rakyat di Pangandaran

Keberadaan hutan rakyat sangat penting bagi mahluk hidup karena banyak memberi manfaat seperti penyedia barang berupa hasil hutan kayu dan non kayu, menyimpan karbon, sumber tambahan pendapatan masyarakat, tempat perlindungan satwa burung (Irawanti dkk, 2012); (Diniyati & Achmad, 2015); (Adelina dkk, 2016); (Siadari dkk, 2014) dan manfaat jasa lainnya

hutan seluas 30.575 Ha yang terbagi 20.891 Ha hutan negara dan 9.684 Ha hutan hak (BPS Kabupaten Pangandaran, 2019). Luasan tersebut memiliki potensi untuk lebih dikembangkan agar kontribusi terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

seperti sumber oksigen dan konservasi tanah. Demikian pula luasan hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran sangat menunjang dalam meningkatkan ketersediaan area terbuka hijau yang diperlukan untuk sumber oksigen di udara. Oleh karena itu keberadaannya harus dijaga dan selalu ditingkatkan baik luas maupun kualitasnya.

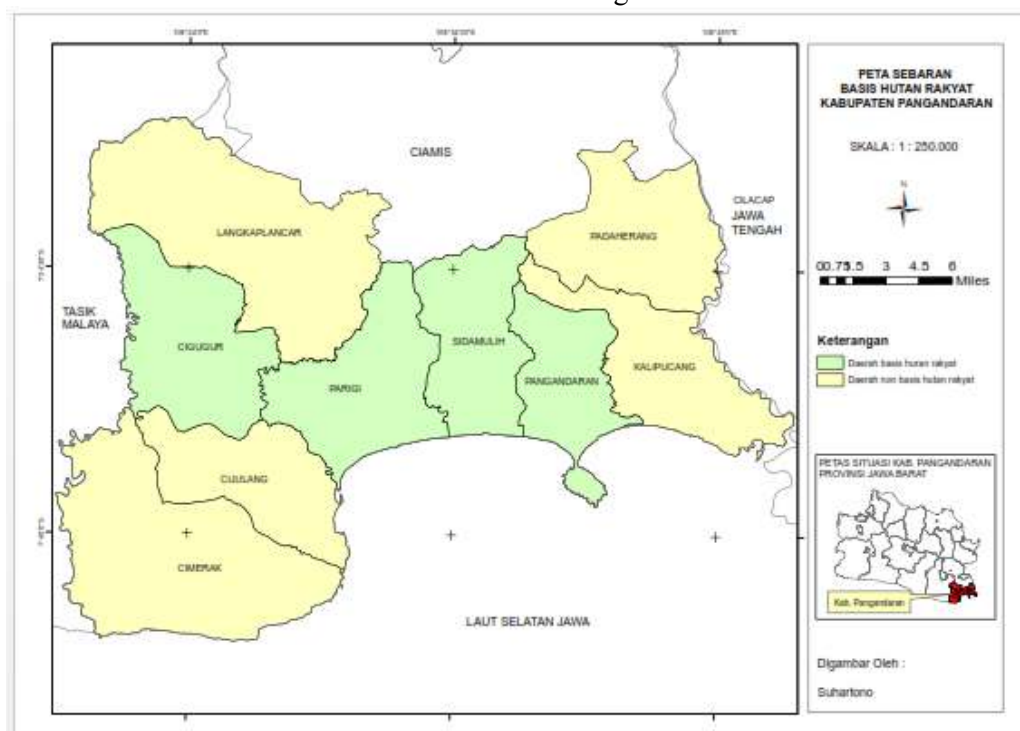
Tabel 2. Luas hutan rakyat dan hasil perhitungan nilai LQ setiap kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)	Luas hutan rakyat (Ha)	LQ	Keterangan
1	Cimerak	11.835	444	0,39	non basis
2	Cijulang	8.804	491	0,58	non basis
3	Cigugur	10.224	3.140	3,21	basis
4	Langkaplancar	17.719	887	0,52	non basis
5	Parigi	9.804	1.671	1,78	basis
6	Sidamulih	7.798	809	1,08	basis
7	Pangandaran	6.077	600	1,03	basis
8	Kalipucang	13.678	742	0,57	non basis
9	Padaherang	11.873	750	0,66	non basis
10	Mangunjaya	3.280	150	0,48	non basis
		101.092	9.684		

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran (2019)

Pemerintah mensyaratkan 30% luasan penutupan hutan dengan sebaran proporsional untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Apabila dilihat dari persentase, luas hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran hanya 9% dari total luas wilayah. Kondisi ini belum ideal dan masih jauh dari angka kebutuhan ruang terbuka hijau seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Namun demikian keberadaan ruang terbuka hijau non hutan rakyat seperti ladang, perkebunan dan hutan negara dapat membantu kekurangan tersebut.

Selain berkontribusi terhadap lingkungan, hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan industri berbahan kayu saat ini telah berganti dari kayu hutan rakyat. Wilayah yang memiliki nilai LQ>1 menggambarkan bahwa daerah tersebut unggul dalam potensi hutan rakyat dan dinilai memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah lebih besar dibanding wilayah lain. Hasil analisis metode LQ seperti pada Tabel 2 menunjukkan bahwa ada empat kecamatan yang menjadi basis hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran antara lain Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan Pangandaran.



Gambar 1. Sebaran basis hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran

Skala Prioritas Pengembangan Hutan Rakyat

Pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilakukan dengan pengembangan suatu komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif (Jauhariyah dan Inayah, 2016). Hal ini karena komoditas pertanian secara umum dipengaruhi oleh kompetitif, spesialisasi dan potensi pertanian pada

daerah tersebut (Wicaksono, 2011). Begitupula pengembangan komoditas hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran seharusnya berdasarkan pada prinsip keunggulan kompetitif dalam menentukan wilayah prioritas.

Tabel 3. Potensi hutan rakyat berdasarkan skala prioritas pengembangan di Kabupaten Pangandaran

No.	Kecamatan	Luas hutan rakyat (Ha)	LQ
1	Cigugur	3.140	3,21
2	Parigi	1.671	1,78
3	Sidamulih	809	1,08
4	Pangandaran	600	1,03
		6.220	

Berdasarkan nilai LQ, wilayah kecamatan dengan basis hutan rakyat yang memiliki peran terhadap perekonomian daerah Kabupaten Pangandaran dengan potensi terbesar adalah Kecamatan Cigugur dengan luas hutan rakyat 3.140 Ha. Ke-empat kecamatan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih unggul dalam potensi hutan rakyat dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Wilayah basis hutan rakyat memiliki kelebihan dari wilayah non basis dalam hal potensi produktivitas hutan rakyat. Selain mampu memenuhi kebutuhan untuk wilayah sendiri, wilayah basis juga memiliki potensi surplus produksi yang dapat diekspor ke wilayah lain. Menurut Rahmat (2011), sektor

basis menunjukkan bahwa sektor tersebut surplus pendapatan sehingga layak untuk dikembangkan dalam pembangunan ekonomi.

Agar produktivitas hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran dapat ditingkatkan diperlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah khususnya dinas yang membidangi kehutanan. Upaya tersebut dapat diawali dengan menetapkan wilayah-wilayah yang menjadi skala prioritas dalam pengembangan hutan rakyat. Melalui skala prioritas pengembangan hutan rakyat pada daerah basis tersebut diharapkan dapat meningkatkan luasan areal hutan rakyat sehingga pola pertumbuhan produksi kayu yang positif selalu terjaga dan terjadi surplus produksi.

KESIMPULAN

Sektor basis hutan rakyat di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi menjadi penggerak perekonomian daerah. Terdapat 4 kecamatan di Kabupaten Pangandaran yang menjadi basis hutan rakyat antara lain Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih dan Kecamatan

Pangandaran. Wilayah tersebut layak untuk dijadikan prioritas dalam pengembangan hutan rakyat karena wilayah basis berpotensi selain dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri juga berpeluang dapat mengekspor produksi untuk memenuhi kebutuhan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, M., Harianto, S. P., dan Nurcahyani, N. 2016. Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Rakyat Pekon Kelungu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. *Sylva Lestari*, 4 (2), 51–60.
- Bangun, R. H. B. 2017. Kajian Potensi Perkebunan Rakyat di Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Location Quotient dan Shift Share. *Jurnal Agrica*, 10 (2), 103–111.
- BPS Kabupaten Pangandaran. 2019. *Kabupaten Pangandaran Dalam Angka Tahun 2018*. Pangandaran: Badan Pusat Statistik.
- Diniyati, D., dan Achmad, B. 2015. Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Usaha Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9 (1), 23–31.
- Hamdani, A. F. 2016. Analisis Location Quotient (LQ) Agropolitan Poncokusumo. *PIG (Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi)*, 1 (1), 44–50.
- Hasanah, N. 2016. *Analisis Pertumbuhan Komoditas Sub Sektor Perkebunan Dalam Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat dengan Metode Location Quotient (LQ) dan Shift Share*. Universitas Islam Indonesia.
- Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode Location

- Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Informatika Pertanian*, 12 (1), 658–675.
- Hidayat, R. 2013. Analisis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 2 (1), 54–66.
- Irawanti, S., Suka, A. P., dan Ekawati, S. 2012. Peranan Kayu dan Hasil Bukan Kayu dari Hutan Rakyat pada Pemilikan Lahan Sempit: Kasus Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 9 (3), 113–125.
- Iyan, R. 2014. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Wilayah Sumatera. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 4(11), 215–234.
- Jauhariyah, N. A., dan Inayah, N. 2016. Analisis Sektor Ekonomi Unggulandi Kabupaten Banyuwangi. *Malia*, 8(1), 85–98.
- Jawang, U. P. 2018. Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan Perkebunan Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8 (3), 396–405.
- Nowar, W., Baskoro, D. P. T., dan Tjahjono, B. 2015. Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan dan Arahannya di Wilayah Kabupaten Cianjur. *Tataloka*, 17 (2), 87–98.
- Nugroho, A. D., Ilsan, M., Efrinda, E., Winaryo, W., Handoyo, R., Suparmono, S., dan Puspitasari, R. 2018. Agribisnis Perkebunan di Kabupaten Cilacap Provinis Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 17(3), 157–164.
- Oksatriandhi, B. B., dan Santoso, E. B. 2014. Identifikasi Komoditas Unggulan di Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman. *Jurnal Teknik ITS*, 3 (1), C8–C11.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahmat, M. 2011. Peran Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 8 (2), 110–121.
- Rizani, A. 2017. Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15 (2), 137–156.
- Rustandi, Y. 2016. Potensi KomoditasPeternakan dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan Asal Ternak di Kota Tarakan. *Agrica Ekstensia*, 10 (2), 55–60.
- Siadari, T. P., Hilmanto, R., dan Hidayat, W. 2014. Potensi Kayu Rakyat dan Strategi Pengembangannya (Studi Kasus) di Hutan Rakyat Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*, 1 (1), 75–84.
- Suhartono. 2019. Comparative Study of Superior Potential of Community Forest for Priority Development in Central Java Province. *Jurnal AGRISEP*, 18 (1), 127–138.
- Syamsiyah, N., Sulistyodewi, S., dan Karyani, T. 2017. Wilayah Potensial dalam Pengembangan Agrowisata Buah di Kabupaten Cirebon. *Optima*, 1 (2), 1–9.
- Wicaksono, I. A. 2011. Analisis Location Quotient Sektor dan Subsektor Pertanian pada Kecamatan di Kabupaten Purworejo. *Mediagro*, 7 (2), 11–18.
- Yulianto, D. P., dan Santoso, E. B. 2013. Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan Pada Koridor Jalan Lintas Selatan Jatim di Kabupaten Tulungagung-Trenggalek. *Jurnal Teknik ITS*, 2 (2), C118–C122.